

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PROMOSI PARIWISATA MELALUI WEBSITE OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

Fadhlan Rizky¹, Aldri Frinaldi², Nora Eka Putri³

¹⁾ Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

²⁾ Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

³⁾ Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

INFORMASI ARTIKEL	A B S T R A K
<p>Diterima: 09 Mei 2019 Direvisi: 10 Mei 2019 Diterbitkan: 13 Mei 2019</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan E-Government melalui website dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan website pariwisata.padang.go.id oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, dan masyarakat yang menggunakan website tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government melalui website untuk promosi pariwisata kota Padang belum dilakukan secara optimal, karena ada beberapa kendala yang dihadapi seperti : Kurangnya SDM untuk melakukan promosi melalui website, Kurangnya dana dan anggaran untuk operasional dan pengembangan website. dan Masih rendahnya mindset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam mempromosikan pariwisata melalui website.</i></p>
<p>KATA KUNCI</p> <p>E-Government, Promosi Pariwisata, Website</p>	
<p>KORESPONDEN</p> <p>No. Telepon: 0822 8458 0998 E-mail: fadhlanightraven@gmail.com alfrinaldi@gmail.com noraekaputri@fis.unp.ac.id</p>	

PENDAHULUAN

Pemerintahan dengan berbagai bentuk institusinya merupakan wadah yang dinamis. Aktivitasnya akan senantiasa mengalami perkembangan dan selalu dipengaruhi oleh dinamika lingkungan global. Artinya, akan banyak tantangan baru dan berbagai inovasi yang dihadapkan pada lingkungan birokrasi pemerintahan serta para aparaturinya. Dalam pemerintahan, sebuah kebijakan yang efektif dan efisien akan sangat mendukung bagi terwujudnya tujuan institusi-institusi pemerintahan dimana mereka bernaung. Sehingga output dan outcome yang ditargetkan dan yang distandarkan dapat dipenuhi. Salah satu harapan pemerintah akan kebijakan yang efektif dan efisien yaitu adanya sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dinamakan *E-Government*.

Dalam menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang mengintruksikan kepada para pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan; (1) Program pengembangan E-Government, (2) Pembangunan dan perencanaan teknologi informasi oleh masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah/Kabupaten/Kota, (3) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi oleh masing-masing SKPD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang nomor 65 tahun 2012 tentang penjabaran tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Padang, mengharuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang untuk mengembangkan *E-Government* yang bertujuan mewujudkan kemudahan distribusi data dan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Dalam hal Pariwisata, Kota Padang memiliki berbagai macam objek wisata yang kebanyakan berhubungan dengan keindahan alamnya. Dalam situs pariwisata.padang.go.id Kota Padang memiliki 6 kategori wisata, yaitu: 1. Wisata Bahari, seperti Pantai Air Manis, Pantai Purus, Pantai Pasir Jambak, Teluk Bayur, Pantai Nirwana, Pantai Caroline. 2. Wisata Alam, seperti Pemandian Lubuk Minturun, Air Terjun Sarasah, Air Terjun 100 Tingkek, Air Terjun Sikayan Balumuik, Air Terjun Tigo Tingkek, Pulau Cubadak, Pulau Pasumpahan, Pulau Pisang, Bukit Tigo Tungku Sajaringan (Bukit Nobita), Taman Bung Hatta. 3. Wisata Sejarah, seperti Jembatan Siti Nurbaya, Museum Adityawarman. 4. Wisata Kuliner, seperti Rendang. 5. Wisata Budaya seperti malamang. 6. Wisata Event, seperti Padang International Dragon Boat Festival dan Tour de Singkarak.

Penelitian ini terfokus pada aplikasi website yang mampu menyajikan data organisasi pemerintahan dan data wisata di Kota Padang serta menggali potensi wisata secara lebih detail di Kota Padang. Sistem yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata adalah sistem informasi wisata berbasis web, dimana aplikasi dan database berpusat di server dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat kapanpun dan dari manapun pengguna berada. Sistem ini memungkinkan pelayanan yang lebih efisien karena pelayanan tidak dilakukan secara *face-to-face*.

Penelitian yang dilakukan dengan mengambil tema “Penerapan *E-Government* dalam Promosi Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang” diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan promosi pariwisata secara detail, baik dan juga efisien. Karena dibangunnya layanan informasi berbasis website, nantinya akan mempermudah para turis baik lokal maupun asing dalam berkunjung ke objek wisata yang ada di Kota Padang sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yang akhirnya dapat menaikkan pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Laporan penelitian wisatawan mancanegara (wisman) yang meninggalkan Indonesia (Passenger Exit Survey) tahun 2001 menunjukkan penggunaan internet/web sebagai media informasi yang digunakan oleh wisman menempati angka tertinggi, sebesar 24,78% terhadap media informasi lainnya. Media lain yang termasuk dalam kategori kurang digunakan oleh wisatawan adalah brosur, catalog, radio dan billboard masing-masing sebesar 6,06%; 2,14%; 1,38%; dan 0.19%. Para wisman yang melakukan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan berlibur merupakan pengguna internet tertinggi, sebesar 25,94% dibandingkan dengan penggunaan media lainnya (Sariyun Naja, 2006). Hal ini memperlihatkan bahwa promosi melalui website nyatanya lebih diminati karena efektif dan efisien.

Namun nyatanya, penerapan E-Government yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam hal mempromosikan pariwisata melalui website belum berjalan maksimal karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis telah melakukan penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan E-Government yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam mempromosikan pariwisata melalui website ?
2. Apa Kendala dalam penerapan E-Government yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam mempromosikan pariwisata melalui website ?
3. Apa solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan E-Government yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam mempromosikan pariwisata melalui website ?

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di Jalan Gandaria no.56, Jati Baru. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014:301), Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secaramaksimal. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan E-Government dalam mempromosikan pariwisata melalui website oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

Menurut Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan E-government, yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. E-government upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat. E-government merupakan proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui penggunaan sistem otomatis dan jaringan internet, umumnya lebih mengacu pada istilah world wide web (Budi Rahardjo, 2001).

Salah satu bentuk penerapan E-Government yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yaitu dengan adanya promosi pariwisata melalui website (pariwisata.padang.go.id). Promosi belakangan ini sudah dilakukan dengan teknologi informasi yang canggih, sehingga promosi secara manual seperti baliho, pamphlet, dsb sudah tidak terlalu banyak dipakai lagi. Hal ini disebabkan karena promosi pariwisata yang dilakukan dengan media internet/website dirasa lebih efektif dan efisien.

Website adalah sebuah fenomena yang membuka kesempatan yang sangat luas dan positif bagi dunia industri pariwisata di Indonesia. Hal ini disebabkan website mampu meningkatkan minat untuk travel di kalangan masyarakat baik lokal maupun internasional, memperluas pasar, dan juga memperluas komunikasi untuk melayani konsumen, dalam hal ini wisatawan.

Menurut Oetome (2001) Website pariwisata yang menarik akan banyak dikunjungi para wisatawan sehingga pemanfaatan website bisa lebih optimal.

Dalam kaitannya dengan penerapan E-Government, menurut Goldschmidt (2002) di dalam Indrajit (2005: 38) ada lima faktor yang menjadi aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan pengembangannya oleh mereka yang ingin membangun website dari pembuatan website e-government, di antaranya yaitu:

1. Audience.

Website pada dasarnya adalah alat untuk berkomunikasi antara penyedia layanan website dan pengguna (user) yang memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Komunikasi dapat terjadi secara efektif jika Pemerintah dapat mendefinisikan secara jelas siapa target dalam website tersebut. Sehingga isi website benar-benar dapat di terima dan bermanfaat sesuai jangkauan target Pemerintah. Audiensi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sudah tepat sasaran. Karena melalui website pariwisata.padang.go.id tidak terbatas kepada satu kalangan dan satu tempat saja. Para pengunjung website dari berbagai kalangan usia dan berbagai lokasi baik lokal maupun mancanegara dapat mengakses website tersebut.

2. Konten

Merupakan isi dari website itu sendiri, baik berupa informasi ataupun pelayanan dari *E-Government*. Jelas dalam hal ini Pemerintah harus membangun konten yang sesuai dengan target awal bagi masyarakat ataupun stakeholder, dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan user demi menciptakan pelayanan publik yang prima. Di dalam website tersebut, konten belum sepenuhnya terisi. Bahkan jika kita melihat di bagian informasi seputar padang dan program kerja dinas itu tidak ada isi sama sekali. Inilah artinya, di bagian konten website tersebut belum dikatakan baik. Padahal dengan adanya konten yang bagus dan menjual, tentunya akan menarik minat calon wisatawan yang akan berkunjung.

3. Interactivity.

Yang dimaksud dari interactivity di sini yaitu adanya proses interaksi dua arah antara Pemerintah pengelola website dan masyarakat pengakses website tersebut. Seperti pemerintah

menyediakan fasilitas berupa contact Center, Electronic email, chats room, Online survey dari pengelola website tersebut. Namun yang penulis temukan, interaksi hanya berlangsung satu arah saja. Artinya media website tersebut hanya berfungsi sebagai media informasi dan publikasi saja. Walaupun begitu, di dalam website tersebut para pengunjung diarahkan untuk berinteraksi melalui media lain seperti whatsapp dan media sosial seperti facebook dan twitter.

4. Usability.

Yaitu kemudahan website untuk diakses dan digunakan oleh user yang belum tentu semua user memiliki pengetahuan IT yang sama dan memadai. Atau secara singkat website tersebut memiliki akses yang user friendly. Website pariwisata.padang.go.id bisa dengan mudah diakses bahkan tidak memiliki batas tertentu untuk mengaksesnya. Jika diketik kata kunci “pariwisata padang” di mesin pencarian online seperti Google, website pariwisata.padang.go.id berada di urutan atas. Sehingga dengan mudah bisa diakses dan digunakan.

5. Innovation.

Untuk tetap menarik atau mempertahankan user dalam menggunakan jasa dari website tersebut perlu adanya pembaharuan dan ide-ide kreatif yang dapat membuat konten dari sebuah website selalu terlihat menarik. Dari unsur-unsur di atas apabila Pemerintah dapat melakukan dan mewujudkan ke dalam sistem Pemerintahan *E-Government* melalui situs website, maka terciptanya pelayanan website yang prima akan sangat mungkin terjadi di Kota Padang. Yang bertujuan terciptanya sinergi antara pihak Pemerintah dengan swasta maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, isi dari website pariwisata.padang.go.id cenderung tidak *up to date*. Informasi yang disajikan merupakan barang lama yang tidak berubah. Dalam hal ini penulis khawatir akan perkembangan website ini bahkan bisa jadi non-aktif dikemudian hari.

B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan E-Government dalam promosi pariwisata melalui Website oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

Dalam melakukan suatu pemberdayaan itu pasti memiliki beberapa hambatan yang dapat menghalangi kelancaran suatu program untuk mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti hambatan teknis yaitu sarana dan juga prasarana serta hambatan perilaku yaitu sifat apatis, egosentris dan juga ketidakmauan untuk berubah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan E-Government dalam mempromosikan pariwisata tersebut (*sumber : wawancara tanggal 29 Agustus 2018*):

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya SDM pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang melakukan promosi melalui website. Ini terlihat dari hanya satu orang saja yang mengelola website tersebut, yaitu Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Padahal SDM diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan SDM untuk menggerakannya. Kesiapan SDM di pemerintahan akan sangat mempengaruhi performa penerapan E-Government. Semakin tinggi tingkat pemahaman sistem informasi SDM di pemerintahan, semakin siap mereka untuk menerapkan konsep E-Government (Richardus,2005). Menurut penelitian yang penulis lakukan, website tersebut hanya satu orang yang mengelolanya. Sehingga menyebabkan pengelolaan website tersebut menjadi hal yang sulit dikerjakan.

b. Dana dan Anggaran

Kurangnya dana dan anggaran untuk operasional dan pengembangan website. Permasalahan mengenai anggaran ini juga. Kepala Bidang pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang, mengatakan bahwa anggaran promosi kota Padang masih sangat minim, anggaran yang tersedia hanya sekitar 300 juta. Padahal di satu sisi Pemerintah Kota Padang mendorong majunya dunia pariwisata, namun di sisi lain anggaran untuk promosi pariwisata masih minim. Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *E-Government* yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Bukan hanya biaya untuk operasional saja, tetapi juga harus ada pengembangan dan pemeliharaan (*maintenance*) dikemudian hari.

c. Rendahnya mindset

Pemerintah terkesan kurang serius dalam pencapaian hasil dari tujuan pemasaran kepariwisataan. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya promosi melalui media online yang dilakukan pihak luar dibandingkan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.

Keaktifan promosi melalui website yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang juga terlihat kurang, hal ini terlihat dari tidak up to date nya entry data dalam website pariwisata.padang.go.id.

C. Upaya mengatasi kendala

Seperti halnya kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap ini harus didukung oleh beberapa faktor sehingga tujuan dari pemberdayaan tersebut tercapai. Pemberdayaan ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang dapat mendukung dalam melakukan pemberdayaan nelayan tangkap di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah. Menurut wijaya (2015:56) ada beberapa faktor untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap

- a. Sumber Daya Manusia, yang menjadi komunikator merupakan orang-orang yang memang ahli dibidangnya.
- b. Meningkatkan sosialisasi peraturan dan pemahaman tentang aturan dalam melakukan penerapan *E-Government* ke semua pegawai.
- c. Mengembangkan program pemberdayaan yang diselenggarakan secara terkoordinasi.
- d. Sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan penerapan *E-Government* yang mendukung. Sehingga dengan demikian pihak Dinas dengan mudah melaksanakan segala bentuk tugas dan tanggung jawabnya terutama dibidang promosi menggunakan teknologi informasi, karena didukung oleh sumber dana dan fasilitas yang memadai.
- e. Sarana dan prasarana. Dalam penerapan *E-Government*, pihak dinas sudah memiliki komputer dengan spesifikasi memadai yang memudahkan dalam penggunaannya. Selain itu juga telah ada teknologi lain yang menunjang berjalannya program *E-Government* khususnya dalam mempromosikan pariwisata kota Padang.

KESIMPULAN

Saat dahulu pemasaran pariwisata cukup hanya dengan memanfaatkan media konvensional, namun saat ini penetrasi internet telah merubah pola distribusi informasi dan komunikasi antara perusahaan dan konsumen dalam sektor pariwisata. Pariwisata yang merupakan sumber devisa bagi Indonesia selain dari faktor minyak dan gas perlu dikembangkan. Pengembangan industri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, mengingat banyak potensi obyek wisata alam dan budaya yang menarik dan pantas dijual di pasaran Internasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang sudah menerapkan E-Government dalam mempromosikan pariwisata kota padang. **Pertama.** Terlihat dari keberadaan website pariwisata.padang.go.id yang masih ada hingga saat ini. Walaupun begitu keberadaannya terasa tidak aktif karena isinya yang tidak *up to date*. Website tersebut bukan hanya dimanfaatkan sebagai media promosi saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat dan juga pengunjung. **Kedua.** Promosi yang dilakukan pihak dinas dengan menggunakan prinsip-prinsip *E-Government*, tidak hanya sekedar website saja tetapi juga melalui media sosial yang banyak tersedia saat ini (seperti ; facebook, twitter, website, instagram dan lain-lain). **Ketiga.** Seharusnya pemerintah bisa memanfaatkannya sebagai sarana promosi pariwisata agar objek-objek wisata yang ada di Kota Padang dapat dikenal luas oleh masyarakat dunia dan menjadi destinasi wisata dunia seperti Bali dan Lombok. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan makin meningkat dari tahun ke tahunnya.. **Keempat.** Fenomena menarik yang penulis lihat, justru visitor yang lebih gencar mempromosikan objek-objek wisata yang berada di Sumbar. Hal ini tidak lepas dari budaya selfie yang melekat di masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung visitor membantu Pemerintah Daerah mempromosikan pariwisatanya.

Adapun kendala dalam melakukan pemberdayaan yang dapat menghalangi kelancaran program tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya seperti **Pertama.** Sumber Daya Manusia (SDM), dimana hanya satu orang saja yang mengelola website. **Kedua.** Dana dan anggaran. **Ketiga** rendahnya mindset pihak dinas untuk memasarkan melalui media website. Solusi pada kendalah diatas adalah pihak dinas harus merekrut pegawai yang memang mempunyai dasar ilmu untuk pengembangan teknologi informasi, seperti lulusan sarjana TI. Ini akan membuat pengelolaan dan pengembangan website akan berjalan baik dikarenakan dipegang oleh orang yang mumpuni di bidangnya. Selanjutnya pihak dinas harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan pariwisata, seperti komunitas pecinta alam, dsb. Sehingga akan mengurangi beban dalam pembiayaan promosi pariwisata karena promosi dilakukan secara sukarela atau minim biaya oleh pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldri dan Afriva. 2017. Membangun Model Kebijakan Budaya Kerja Sadar Wisata di Kalangan Aparatur dan Masyarakat Berkunjung ke Lokasi Wisata di Sumatera Barat. UNP:program pascasarjana
- Angipora Marius. 2002. Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Rahardjo. 2001. Membangun E-Government. Jurnal Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar. Volume 19.
- Dana, S., H. Puspa., dan Y. Firdaus. 2008. Analisis Kanjian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Depkominfo. 2010. Buku Panduan Pembangunan Situs Web Pemerintah Daerah Peserta USDRP
- Edwi, A. Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia Perspektif Content dan Manajemen.
- Freddy Rangkuti. 2010. Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gamal Suwanto. 2003. *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: ANDI

- I Gede Pitana, dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI
- Instruksi Presiden no.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Lexi J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, H. 2002. Pengetahuan Kepariwisata Edisi Revisi. Bandung : AlfaBeta.
- Oetomo B.S.D. 2001. Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi: Perspektif e-bussiness, Andi, Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Padang nomor 18 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang
- Perwako Padang no.65 tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
- R. G Soekadijo. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Richardus Eko Indrajit. 2004. *Electronic Government; Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- Richardus Eko Indrajit. 2005. *E-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: ANDI.
- Rizki, A. 2015. Peran Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan Mempromosikan Pariwisata Pulau Morotai. e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No.4.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Metode R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo , Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryadana, M. Liga & Octavia, Vanny. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 2002. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Wescott, Clay & Development Bank, Asian. (2001). *E-Government and the Applications of Technology to Government Services*.
- Wijaya, Ida Suryani. 2015. "Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan". *Lentera*, Vol. XVIII No. 1 Hal: 53-61
- Yoeti, Oka A. 2001. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa